



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511,
Telepon (0291) 685877, Faksimile : (0291) 685625,
Laman : setda.demakkab.go.id, Pos-el : setda@demakkab.go.id

13

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Asisten Pemerintahan dan Kesra **DW**
Tanggal : 30 Mei 2024
Nomor : 180/ 746
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon tandatangan.

Ditetapkan 27/2024
3

Ditinyah 22/2024
3

BD 13

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP.197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : bpkpad@demakkab.go.id

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. BUPATI DEMAK
LEWAT : 1. YTH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK ²
2. YTH. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KAB. DEMAK ^{DLU}
3. YTH. Plt. KABAG HUKUM SETDA KAB. DEMAK ^f
DARI : Plt. KEPALA BPKPAD KABUPATEN DEMAK
TANGGAL : 22 MEI 2024
SIFAT : SEGERA
PERIHAL : MOHON TANDA TANGAN PADA KONSEP PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERBUP NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Dengan hormat bersama ini kami sampaikan konsep Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dalam Pergeseran mendahului Perubahan kali ini terdiri atas 20 OPD yang menyampaikan surat permohonan, meliputi :

NO	OPD
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5	KECAMATAN MIJEN
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	DINAS PARIWISATA
8	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
13	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
14	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	OPD
15	DINAS PERHUBUNGAN
16	SEKRETARIAT DAERAH
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
19	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
20	KECAMATAN BONANG

Sehubungan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami mohon Ibu Bupati berkenan membubuhkan tanda tangan pada Peraturan Bupati Demak dan Lampiran Peraturan Bupati Demak dimaksud, sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK


Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670821 198607 1 001

M. H. H.
27/2024
5

Koreksi !!!
Edit Hand
Harmon

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Bab VI huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor 900/170/2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Yang Sama di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa guna pemenuhan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, agar dapat melakukan penyesuaian anggaran dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah untuk ketiga kalinya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
 4. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

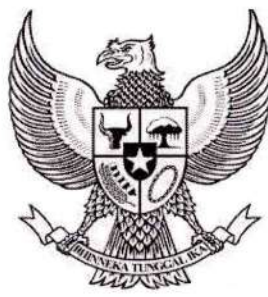
EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna pemenuhan pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, perlu penyesuaian anggaran dengan melakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran BAB VI huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran antara obyek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

*dasar mengiyat
man yang beda
perbup 40/2023
stsbh ts
perbup 6/2024;*

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2023 Nomor 62);
14. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 41 Tahun 2023 Tanggal 22 Desember 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, dengan Pergeseran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah dengan daftar pergeseran/ perubahan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2024

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PERUBAHAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

No	KODE REKENING	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
		URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.362.155.892	1.03.2.10.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.362.155.892	-	
5.		Belanja Daerah	17.362.155.892	5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.362.155.892	-	
5.1		Belanja Operasi	17.362.155.892	5.1	Belanja Daerah	17.362.155.892	-	
5.1.01		Belanja Pegawai	17.362.155.892	5.1.01	Belanja Pegawai	17.362.155.892	-	
5.1.01.01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.915.325.892	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.915.325.892	-	
5.1.01.01.01		Belanja Gaji Pokok ASN	8.024.328.672	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.979.368.672	- 44.960.000	
5.1.01.01.01.0001		Belanja Gaji Pokok PNS	7.209.075.600	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	7.164.115.600	- 44.960.000	
5.1.01.01.01.0002		Belanja Gaji Pokok PPPK	815.253.072	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	815.253.072	-	
5.1.01.01.02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	885.433.913	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	885.433.913	-	
5.1.01.01.02.0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	799.200.000	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	799.200.000	-	
5.1.01.01.02.0002		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	86.233.913	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	86.233.913	-	
5.1.01.01.03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	255.000.000	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	255.000.000	-	
5.1.01.01.03.0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	255.000.000	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	255.000.000	-	
5.1.01.01.04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.422.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	110.422.000	-	
5.1.01.01.04.0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	110.422.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	110.422.000	-	
5.1.01.01.05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	438.994.748	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	438.994.748	-	
5.1.01.01.05.0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	335.000.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	335.000.000	-	
5.1.01.01.05.0002		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	103.994.748	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	103.994.748	-	
5.1.01.01.06		Belanja Tunjangan Beras ASN	508.277.600	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	508.277.600	-	
5.1.01.01.06.0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	458.000.000	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	458.000.000	-	
5.1.01.01.06.0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK	50.277.600	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	50.277.600	-	
5.1.01.01.07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.260.000	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	55.220.000	44.960.000	
5.1.01.01.07.0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.260.000	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	50.260.000	40.000.000	
				5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	4.960.000	4.960.000	
5.1.01.01.08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.479.279	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.479.279	-	
5.1.01.01.08.0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.701.199	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.701.199	-	
5.1.01.01.08.0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.778.080	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.778.080	-	
5.1.01.01.09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	553.329.680	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	553.329.680	-	
5.1.01.01.09.0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	491.449.680	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	491.449.680	-	
5.1.01.01.09.0002		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	61.880.000	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	61.880.000	-	
5.1.01.01.10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.876.000	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.876.000	-	
5.1.01.01.10.0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.336.000	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.336.000	-	
5.1.01.01.10.0002		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8.540.000	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8.540.000	-	
5.1.01.01.11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	70.144.000	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	70.144.000	-	
5.1.01.01.11.0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	43.416.000	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	43.416.000	-	

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.01.11.0002		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	26.728.000	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	26.728.000
5.1.01.01.12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	30.780.000	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	30.780.000
5.1.01.01.12.0001		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	24.300.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	24.300.000
5.1.01.01.12.0002		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	6.480.000	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	6.480.000
5.1.01.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.446.830.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.446.830.000
5.1.01.02.01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.578.732.000	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.578.732.000
5.1.01.02.01.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.178.668.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.178.668.000
5.1.01.02.01.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	400.064.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	400.064.000
5.1.01.02.05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.868.098.000	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.868.098.000
5.1.01.02.05.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.268.002.000	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.268.002.000
5.1.01.02.05.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	600.096.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	600.096.000
2	3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		3.27.2.09.0.00.01.0000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
2.09.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.138.661.344	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.138.661.344
5.1		Belanja Daerah	16.138.661.344	5.1	Belanja Daerah	16.138.661.344
5.1.01		Belanja Operasi	16.138.661.344	5.1.01	Belanja Operasi	16.138.661.344
5.1.01.01		Belanja Pegawai	16.138.661.344	5.1.01.01	Belanja Pegawai	16.138.661.344
5.1.01.01.01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.748.337.844	5.1.01.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.748.337.844
5.1.01.01.01.0001		Belanja Gaji Pokok ASN	7.078.184.423	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok ASN	7.078.184.423
5.1.01.01.01.0002		Belanja Gaji Pokok PNS	3.618.585.903	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PNS	3.618.585.903
5.1.01.01.01.0002		Belanja Gaji Pokok PPPK	3.459.598.520	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.459.598.520
5.1.01.01.02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	561.729.923	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	561.729.923
5.1.01.01.02.0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	333.456.298	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	333.456.298
5.1.01.01.02.0002		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	228.273.625	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	228.273.625
5.1.01.01.03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	191.870.000	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	191.870.000
5.1.01.01.03.0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	191.870.000	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	191.870.000
5.1.01.01.04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	560.140.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	560.140.000
5.1.01.01.04.0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	560.140.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	560.140.000
5.1.01.01.05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	292.904.612	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	292.904.612
5.1.01.01.05.0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.690.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	39.690.000
5.1.01.01.05.0002		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	253.214.612	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	253.214.612
5.1.01.01.06		Belanja Tunjangan Beras ASN	395.970.833	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	395.970.833
5.1.01.01.06.0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	179.262.440	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	179.262.440
5.1.01.01.06.0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK	216.708.393	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	216.708.393
5.1.01.01.07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.947.660	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.947.660
5.1.01.01.07.0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.947.660	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.947.660
5.1.01.01.07.0002		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	16.947.660	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	16.947.660
5.1.01.01.08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	-	5.1.01.01.07.0002	Belanja Pembulatan Gaji ASN	128.364
5.1.01.01.08.0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS	128.364	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	128.364
5.1.01.01.08.0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	52.920	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.920
5.1.01.01.09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	75.444	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	75.444
5.1.01.01.09.0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	552.874.308	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	552.874.308
5.1.01.01.09.0002		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	348.002.510	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	348.002.510
5.1.01.01.10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	204.871.798	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	204.871.798
5.1.01.01.10.0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	16.300.581	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	16.300.581
5.1.01.01.10.0002		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	8.701.167	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.701.167
5.1.01.01.11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.599.414	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	7.599.414
5.1.01.01.11.0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	45.718.374	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	45.718.374
			26.390.418	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	26.390.418
						8

No	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		19.327.956	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	19.327.956	-
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan		35.568.766	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	35.568.766	-
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan		18.183.849	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	18.183.849	-
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan		17.384.917	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	17.384.917	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		6.390.323.500	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.390.323.500	-
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		2.536.002.560	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.536.002.560	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1.404.914.560	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.404.914.560	-
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		1.131.088.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.131.088.000	-
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		3.854.320.940	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.854.320.940	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		2.115.688.940	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.115.688.940	-
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		1.738.632.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.738.632.000	-
3							
1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			1.01.2.22.0.00.02.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		375.862.117.350	01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	378.124.691.437	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan		195.755.855.350	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Dan Tunjangan	195.755.855.350	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		195.755.855.351	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	195.755.855.351	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		90.913.767.910	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	90.770.767.910	- 143.000.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		16.240.360.822	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.240.360.822	
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		9.211.243.552	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.211.243.552	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		300.000.000	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	300.000.000	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK		16.148.750.800	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	16.148.750.800	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		516.887.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	516.887.000	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		5.669.762.000	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.669.762.000	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		9.150.621.858	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.150.621.858	
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PNS		6.713.330.379	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PNS	6.713.330.379	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan Beras PPPK		1.386.780.797	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.386.780.797	
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPH PNS		493.942.435	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPH PPPK	636.942.435	143.000.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		5.538.648	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.538.648	
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		5.138.089	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.138.089	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		16.591.969.631	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	16.591.969.631	
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		4.473.323.188	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.473.323.188	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		442.961.769	5.1.01.01.10.0001	Belanja Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	442.961.769	
5.1.01.01.10.0002	Belanja Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		218.205.293	5.1.01.01.10.0002	Belanja Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	218.205.293	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Tunjangan Jaminan Kematian PNS		1.325.172.953	5.1.01.01.11.0001	Belanja Tunjangan Jaminan Kematian PNS	1.325.172.953	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Tunjangan Jaminan Kematian PPPK		654.585.260	5.1.01.01.11.0002	Belanja Tunjangan Jaminan Kematian PPPK	654.585.260	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan		1.538.776.060	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	1.538.776.060	
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan		367.717.642	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	367.717.642	
5.1.01.02	Tambahan Penghasilan		15.228.250.000	1.01.01.01.5.1.1	Tambahan Penghasilan	15.228.250.000	
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		3.595.000.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.595.000.000	
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		2.022.200.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.022.200.000	
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS		377.000.000	5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	377.000.000	
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK		565.500.000	5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	565.500.000	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		5.609.000.000	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	5.609.000.000	
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		3.059.550.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	3.059.550.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN		164.878.012.000	5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	164.878.012.000	
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD		164.878.012.000	5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	164.878.012.000	
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD		164.878.012.000	5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	164.878.012.000	

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.03.05		Belanja Tamsil Guru PNSD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	-	5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	-
5.1.01.03.05.0001		Belanja Tamsil Guru PNSD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	-	5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD [Belanja Gaji dan Tunjangan]	-
4	1.06.2.08.0.00.02.0000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1.06.2.08.0.00.02.0000	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.352.930.336	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.352.930.336
5		Belanja Daerah	5.352.930.336	5	Belanja Daerah	5.352.930.336
5.1		Belanja Operasi	5.352.930.336	5.1	Belanja Operasi	5.352.930.336
5.1.01		Belanja Pegawai	5.352.930.336	5.1.01	Belanja Pegawai	5.352.930.336
5.1.01.01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.121.350.236	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.121.350.236
5.1.01.01.01		Belanja Gaji Pokok ASN	2.248.721.012	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.247.636.012
5.1.01.01.01.0001		Belanja Gaji Pokok PNS	1.682.983.440	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.681.898.440
5.1.01.01.01.0001		Belanja Gaji Pokok PPPK	565.737.572	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PPPK	565.737.572
5.1.01.01.02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	195.874.120	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	195.874.120
5.1.01.01.02.0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	142.714.440	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	142.714.440
5.1.01.01.02.0002		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	53.159.680	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	53.159.680
5.1.01.01.03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.511.496	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.511.496
5.1.01.01.03.0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.511.496	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.511.496
5.1.01.01.04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	101.395.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	101.395.000
5.1.01.01.04.0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	95.149.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	95.149.000
5.1.01.01.04.0002		Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.246.000	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.246.000
5.1.01.01.05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	104.394.544	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	104.394.544
5.1.01.01.05.0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.031.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	47.031.000
5.1.01.01.05.0002		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	57.363.544	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	57.363.544
5.1.01.01.06		Belanja Tunjangan Beras ASN	114.544.520	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	114.544.520
5.1.01.01.06.0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	81.521.000	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.521.000
5.1.01.01.06.0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK	33.023.520	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	33.023.520
5.1.01.01.07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.576.840	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.576.840
5.1.01.01.07.0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.576.840	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.576.840
5.1.01.01.08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	102.520	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	102.520
5.1.01.01.08.0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.200	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.200
5.1.01.01.08.0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.320	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.320
5.1.01.01.09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	176.907.376	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	176.907.376
5.1.01.01.09.0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	153.971.496	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	153.971.496
5.1.01.01.09.0002		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.935.880	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	22.935.880
5.1.01.01.10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.364.520	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.364.520
5.1.01.01.10.0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.282.280	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.282.280
5.1.01.01.10.0002		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.082.240	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.082.240
5.1.01.01.11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.484.288	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.484.288
5.1.01.01.11.0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.237.720	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	15.237.720
5.1.01.01.11.0002		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.246.568	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.246.568
5.1.01.01.12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	12.474.000	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	12.474.000
5.1.01.01.12.0001		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	12.474.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	12.474.000
5.1.01.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.231.580.100	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.231.580.100
5.1.01.02.01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	998.902.000	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	998.902.000
5.1.01.02.01.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	951.794.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	951.794.000
5.1.01.02.01.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	47.108.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	47.108.000

No	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.120.000	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.120.000	-
	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	88.200	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.085.000	1.085.000
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.400	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	88.200	-
	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28.800	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.400	-
	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	310.800.000	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28.800	-
	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	280.800.000	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	310.800.000	-
	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	30.000.000	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	280.800.000	-
	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.714.240	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	30.000.000	-
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.994.240	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.714.240	-
	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	720.000	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.994.240	-
	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.000.000	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	720.000	-
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.600.000	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.000.000	-
	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.400.000	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.600.000	-
	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	25.280.000	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.400.000	-
	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	17.280.000	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	25.280.000	-
	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	8.000.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	17.280.000	-
	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.759.120.000	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	8.000.000	-
	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.050.000.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.759.120.000	-
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	927.120.000	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.050.000.000	-
	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	122.880.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	927.120.000	-
	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.709.120.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK	122.880.000	-
	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.524.800.000	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.709.120.000	-
	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	184.320.000	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.524.800.000	-
				5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	184.320.000	-
7	3.26.0.0.0.0.01.0000	DINAS PARIWISATA					
	3.26.01.2.02.0001	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.455.852.939	3.26.0.0.0.0.01.0000	DINAS PARIWISATA		
	5.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.737.519.741	3.26.01.2.02.0001	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.455.852.939	-
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.295.519.741	5.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.717.519.741	(20.000.000)
	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	442.000.000	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.275.519.741	(20.000.000)
	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	185.500.000	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	442.000.000	-
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.000.000	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	185.500.000	-
	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.500.000	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.000.000	-
	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	90.000.000	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.500.000	-
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.000.000	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	90.000.000	-
	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	45.360.000	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	90.000.000	-
	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	45.360.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	45.360.000	-
	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73.810.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	45.360.000	-
	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.810.000	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.810.000	-
	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	33.000.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.810.000	-
	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	113.500.000	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	33.000.000	-
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.000.000	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	113.500.000	-
	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	38.500.000	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.000.000	-
	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.100.000	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	38.500.000	-
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.000.000	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.100.000	20.000.000
	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.100.000	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.000.000	15.000.000
	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.200	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	6.100.000	5.000.000
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	33.200	-
			20.000	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.000	-

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.01.08.0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.200	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.200
5.1.01.01.09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	164.603.200	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	164.603.200
5.1.01.01.09.0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	120.000.000	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	120.000.000
5.1.01.01.09.0002		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	44.603.200	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	44.603.200
5.1.01.01.10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.606.187	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.606.187
5.1.01.01.10.0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.109.307	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.109.307
5.1.01.01.10.0002		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.496.880	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.496.880
5.1.01.01.11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.820.611	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.820.611
5.1.01.01.11.0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.327.891	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.327.891
5.1.01.01.11.0002		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.492.720	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	3.492.720
5.1.01.01.12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	20.000.000	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	20.000.000
5.1.01.01.12.0001		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	12.000.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	12.000.000
5.1.01.01.12.0002		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	8.000.000	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	8.000.000
5.1.01.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.819.740.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.819.740.000
5.1.01.02.01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	57.854.000	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	57.854.000
5.1.01.02.01.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	512.820.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	512.820.000
5.1.01.02.01.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	245.034.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	245.034.000
5.1.01.02.05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.061.886.000	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.061.886.000
5.1.01.02.05.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	769.230.000	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	769.230.000
5.1.01.02.05.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	292.656.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	292.656.000
8	5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
1-02.0-00-0-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.404.346.047	1-02.0-00-0-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.404.346.047
5.1.01.01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.404.346.047	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.404.346.047
5.1.01.01.01		Belanja Gaji Pokok ASN	2.527.250.881	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.527.250.881
5.1.01.01.01.0001		Belanja Gaji Pokok PNS	1.657.617.174	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.657.617.174
5.1.01.01.01.0002		Belanja Gaji Pokok PPPK	869.633.707	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	869.633.707
5.1.01.01.02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	252.955.081	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	249.955.081
5.1.01.01.02.0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	146.658.647	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	146.658.647
5.1.01.01.02.0002		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	106.296.434	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	103.296.434
5.1.01.01.03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.000.000	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	105.000.000
5.1.01.01.03.0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	105.000.000	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	105.000.000
5.1.01.01.04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	290.342.732	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	290.342.732
5.1.01.01.04.0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	174.640.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	174.640.000
5.1.01.01.04.0002		Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	115.702.732	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	115.702.732
5.1.01.01.05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	98.538.476	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	98.538.476
5.1.01.01.05.0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.510.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.510.000
5.1.01.01.05.0002		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	50.028.476	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	50.028.476
5.1.01.01.06		Belanja Tunjangan Beras ASN	144.290.840	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	144.290.840
5.1.01.01.06.0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	94.290.840	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	94.290.840
5.1.01.01.06.0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK	50.000.000	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	50.000.000
5.1.01.01.07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.000.000	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.000.000
5.1.01.01.07.0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.000.000	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.000.000
5.1.01.01.07.0002		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.000.000
5.1.01.01.08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.775	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.775
5.1.01.01.08.0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.000	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50.000
5.1.01.01.08.0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.775	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.775
5.1.01.01.09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	236.449.662	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	236.449.662

SEBELUM PERGESERAN				SETELAH PERGESERAN			
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	TAMBAH/ KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.01.01.09.0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	173.598.121	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	173.598.121	-
5.1.01.01.09.0002		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	62.851.541	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	62.851.541	-
5.1.01.01.10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.025.713	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.025.713	-
5.1.01.01.10.0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.046.263	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.046.263	-
5.1.01.01.10.0002		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.979.450	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.979.450	-
5.1.01.01.11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.576.887	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.576.887	-
5.1.01.01.11.0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.138.744	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.138.744	-
5.1.01.01.11.0002		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.438.143	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.438.143	-
5.1.01.01.12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	12.500.000	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	12.500.000	-
5.1.01.01.12.0001		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	10.800.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	10.800.000	-
5.1.01.01.12.0002		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	1.700.000	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	1.700.000	-
5.1.01.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.703.315.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.703.315.000	-
5.1.01.02.01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.090.326.000	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.090.326.000	-
5.1.01.02.01.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	865.326.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	865.326.000	-
5.1.01.02.01.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	225.000.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	225.000.000	-
5.1.01.02.05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.612.989.000	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.612.989.000	-
5.1.01.02.05.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.297.989.000	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.297.989.000	-
5.1.01.02.05.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	315.000.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	315.000.000	-
9	5.02.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		5.02.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		
5.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.422.685.954	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.422.685.954	-
5.1.01.01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.422.685.954	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.422.685.954	-
5.1.01.01.01		Belanja Gaji Pokok ASN	3.017.245.470	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.005.245.470	- 12.000.000
5.1.01.01.01.0001		Belanja Gaji Pokok PNS	2.614.573.770	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.602.573.770	- 12.000.000
5.1.01.01.01.0002		Belanja Gaji Pokok PPPK	402.671.700	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	402.671.700	-
5.1.01.01.02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	340.608.223	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	340.608.223	-
5.1.01.01.02.0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	284.234.185	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	284.234.185	-
5.1.01.01.02.0002		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	56.374.038	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	56.374.038	-
5.1.01.01.03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	178.865.750	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	178.865.750	-
5.1.01.01.03.0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	178.865.750	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	178.865.750	-
5.1.01.01.04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	93.240.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	93.240.000	-
5.1.01.01.04.0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	93.240.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	93.240.000	-
5.1.01.01.05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	135.119.794	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	135.119.794	-
5.1.01.01.05.0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.422.250	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.422.250	-
5.1.01.01.05.0002		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	55.697.544	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	55.697.544	-
5.1.01.01.06		Belanja Tunjangan Beras ASN	197.824.528	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	197.824.528	-
5.1.01.01.06.0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	157.848.688	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	157.848.688	-
5.1.01.01.06.0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK	39.975.840	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	39.975.840	-
5.1.01.01.07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.200.000	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.200.000	12.000.000
5.1.01.01.07.0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.200.000	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.200.000	10.000.000
5.1.01.01.07.0002		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000	2.000.000
5.1.01.01.08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.695	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.695	-
5.1.01.01.08.0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.679	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47.679	-
5.1.01.01.08.0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.016	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.016	-
5.1.01.01.09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	289.221.994	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	289.221.994	-
5.1.01.01.09.0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	255.959.998	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	255.959.998	-
5.1.01.01.09.0002		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	33.261.996	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	33.261.996	-

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN				
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	TAMBAH/ KURANG
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.01.01.10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.099.712	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.099.712	-
5.1.01.01.10.0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.133.049	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.133.049	-
5.1.01.01.10.0002		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	966.663	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	966.663	-
5.1.01.01.11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.905.517	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.905.517	-
5.1.01.01.11.0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.006.254	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.006.254	-
5.1.01.01.11.0002		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.899.263	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.899.263	-
5.1.01.01.12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	119.296.271	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	119.296.271	-
5.1.01.01.12.0001		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	90.666.935	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	90.666.935	-
5.1.01.01.12.0002		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	28.629.336	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	28.629.336	-
5.1.01.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.346.052.874	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.346.052.874	-
5.1.01.02.01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	944.258.170	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	944.258.170	-
5.1.01.02.01.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	900.288.170	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	900.288.170	-
5.1.01.02.01.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	43.970.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	43.970.000	-
5.1.01.02.05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.401.794.704	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.401.794.704	-
5.1.01.02.05.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.337.474.704	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.337.474.704	-
5.1.01.02.05.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	64.320.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	64.320.000	-
5.1.01.03		Belanja Tambahan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	6.662.861.130	5.1.01.03	Belanja Tambahan Berdasarkan Pertimbangan Objektif	6.662.861.130	-
5.1.01.03.01		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.711.280.000	5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	5.711.280.000	-
5.1.01.03.01.0006		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	14.025.000	5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	14.025.000	-
5.1.01.03.01.0007		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	152.872.500	5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	152.872.500	-
5.1.01.03.01.0008		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	10.359.375	5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	10.359.375	-
5.1.01.03.01.0009		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	80.484.375	5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	80.484.375	-
5.1.01.03.01.0010		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.891.125.000	5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.891.125.000	-
5.1.01.03.01.0011		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	54.187.500	5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	54.187.500	-
5.1.01.03.01.0012		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	79.687.500	5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	79.687.500	-
5.1.01.03.01.0013		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	382.500	5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	382.500	-
5.1.01.03.01.0014		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.593.750	5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.593.750	-
5.1.01.03.01.0015		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2.470.312.500	5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2.470.312.500	-
5.1.01.03.01.0016		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	956.250.000	5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	956.250.000	-
5.1.01.03.02		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Restribusi Daerah	951.581.130	5.1.01.03.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Restribusi Daerah	951.581.130	-
5.1.01.03.02.0002		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.043.750	5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	26.043.750	-
5.1.01.03.02.0004		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.290.625	5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	18.290.625	-
5.1.01.03.02.0009		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	845.625	5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	845.625	-
5.1.01.03.02.0011		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera /Tera Umum	-	5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera /Tera Umum	-	-

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.03.02.0014		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	250.636.875	5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	250.636.875
5.1.01.03.02.0015		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	244.650.000	5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	244.650.000
5.1.01.03.02.0016		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	93.796.875	5.1.01.03.02.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	93.796.875
5.1.01.03.02.0017		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	187.500	5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	187.500
5.1.01.03.02.0018		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	59.560.380	5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	59.560.380
5.1.01.03.02.0020		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.125.000	5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	1.125.000
5.1.01.03.02.0022		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	98.261.250	5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	98.261.250
5.1.01.03.02.0024		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.780.750	5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	9.780.750
5.1.01.03.02.0027		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	277.500	5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	277.500
5.1.01.03.02.0031		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan/Gedung	131.250.000	5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan/Gedung	131.250.000
5.1.01.03.02.0032		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga KerjaAsing (TKA)	16.875.000	5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga KerjaAsing (TKA)	16.875.000
5.1.01.05		Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.823.433.210	5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.823.433.210
5.1.01.05.10		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.506.239.500	5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.506.239.500
5.1.01.05.10.0006		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.500.000	5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.500.000
5.1.01.05.10.0007		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	59.950.000	5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	59.950.000
5.1.01.05.10.0008		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.062.500	5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	4.062.500
5.1.01.05.10.0009		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	31.562.500	5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	31.562.500
5.1.01.05.10.0010		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	483.600.000	5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	483.600.000
5.1.01.05.10.0011		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	21.250.000	5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	21.250.000
5.1.01.05.10.0012		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	31.250.000	5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	31.250.000
5.1.01.05.10.0013		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	150.000	5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	150.000
5.1.01.05.10.0014		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	625.000	5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	625.000
5.1.01.05.10.0015		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	502.680.000	5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	502.680.000
5.1.01.05.10.0016		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	365.609.500	5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	365.609.500
8						

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.05.11	5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH	317.193.710	5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah Bagi KDH/WKDH	317.193.710
5.1.01.05.11.0002	5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.681.250	5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	8.681.250
5.1.01.05.11.0004	5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.096.875	5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.096.875
5.1.01.05.11.0009	5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	281.875	5.1.01.05.11.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	281.875
5.1.01.05.11.0011	5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Umum Tera/Tera Umum	-	5.1.01.05.11.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Umum Tera/Tera Umum	-
5.1.01.05.11.0014	5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	83.545.625	5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	83.545.625
5.1.01.05.11.0015	5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	81.550.000	5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	81.550.000
5.1.01.05.11.0016	5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	31.265.625	5.1.01.05.11.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	31.265.625
5.1.01.05.11.0017	5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	62.500	5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	62.500
5.1.01.05.11.0018	5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	19.853.460	5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	19.853.460
5.1.01.05.11.0020	5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	375.000	5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	375.000
5.1.01.05.11.0022	5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahrag	32.753.750	5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahrag	32.753.750
5.1.01.05.11.0024	5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.260.250	5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.260.250
5.1.01.05.11.0027	5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	92.500	5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	92.500
5.1.01.05.11.0031	5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan BangunanGedung	43.750.000	5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan BangunanGedung	43.750.000
5.1.01.05.11.0032	5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan TenagaKerja Asing (TKA)	5.625.000	5.1.01.05.11.0032	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan TenagaKerja Asing (TKA)	5.625.000
5.1.02	5.1.02.02	Belanja Barang Dan Jasa	1.010.519.790	5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	1.010.519.790
5.1.02.02	5.1.02.02.13	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.010.519.790	5.1.02.02.13	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.010.519.790
5.1.02.02.13.0006	5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.475.000	5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	2.475.000
5.1.02.02.13.0007	5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	26.977.500	5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	26.977.500
5.1.02.02.13.0008	5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.828.110	5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.828.110

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	14.203.080	5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	14.203.080	-
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	336.374.970	5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	336.374.970	-
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.562.470	5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.562.470	-
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	14.062.470	5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	14.062.470	-
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	67.470	5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	67.470	-
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	281.220	5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	281.220	-
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	435.937.500	5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	435.937.500	-
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	168.750.000	5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	168.750.000	-
10	1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.030.744.978	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.030.744.978	-
5	Belanja Daerah	4.030.744.978	5	Belanja Daerah	4.030.744.978	-
5.1	Belanja Operasi	4.030.744.978	5.1	Belanja Operasi	4.030.744.978	-
5.1.01	Belanja Pegawai	4.030.744.978	5.1.01	Belanja Pegawai	4.030.744.978	-
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.213.474.978	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.213.474.978	-
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.624.040.725	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.621.560.725	- 2.480.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.108.847.686	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.106.367.686	- 2.480.000
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	515.193.039	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	515.193.039	-
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	169.941.623	5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	169.941.623	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	138.544.187	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	138.544.187	-
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	31.397.436	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	31.397.436	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	85.286.902	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	85.286.902	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85.286.902	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85.286.902	-
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.680.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.680.000	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.680.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	22.680.000	-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.959.300	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.959.300	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.009.300	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.009.300	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.950.000	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12.950.000	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	128.221.070	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	128.221.070	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.943.470	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.943.470	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.277.600	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20.277.600	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.160.000	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.160.000	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.160.000	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.160.000	-
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.480.000	2.480.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.661	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.661	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	54.764	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	54.764	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.897	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.897	-
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	92.872.910	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	92.872.910	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.000.000	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.000.000	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.872.910	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	11.872.910	-

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.01.10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.938.272	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.938.272
5.1.01.01.10.0001		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.400.000	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.400.000
5.1.01.01.10.0002		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	538.272	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	538.272
5.1.01.01.11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.334.740	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.334.740
5.1.01.01.11.0001		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.720.000	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.720.000
5.1.01.01.11.0002		Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.614.740	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.614.740
5.1.01.01.12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	6.978.775	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	6.978.775
5.1.01.01.12.0001		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	5.841.238	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	5.841.238
5.1.01.01.12.0002		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	1.137.537	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	1.137.537
5.1.01.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.817.270.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.817.270.000
5.1.01.02.01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	721.775.635	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	721.775.635
5.1.01.02.01.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	561.775.635	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	561.775.635
5.1.01.02.01.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	160.000.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	160.000.000
5.1.01.02.05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.095.494.365	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.095.494.365
5.1.01.02.05.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	884.940.730	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	884.940.730
5.1.01.02.05.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	210.553.635	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	210.553.635
11		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.435.325.992	01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.435.325.992
5		Belanja Daerah	4.435.325.992	5	Belanja Daerah	4.435.325.992
5.1		Belanja Operasi	4.435.325.992	5.1	Belanja Operasi	4.435.325.992
5.1.1		Belanja Pegawai	4.435.325.992	5.1.1	Belanja Pegawai	4.435.325.992
5.1.1.01		Belanja Gaji Pokok ASN	1.362.644.354	5.1.1.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.362.644.354
5.1.1.01.0001		Belanja Gaji Pokok PNS	1.081.644.354	5.1.1.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.081.644.354
5.1.01.01.01.0002		Belanja Gaji Pokok PPPK	281.000.000	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	281.000.000
5.1.1.02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	177.432.204	5.1.1.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	177.432.204
5.1.1.02.0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	141.432.204	5.1.1.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	141.432.204
5.1.01.01.02.0002		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	36.000.000	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	36.000.000
5.1.1.03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	163.830.000	5.1.1.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	163.830.000
5.1.1.03.0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	163.830.000	5.1.1.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	163.830.000
5.1.1.1.04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	216.740.000	5.1.1.1.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	216.740.000
5.1.01.01.04.0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	216.740.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	216.740.000
5.1.1.05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.540.000	5.1.1.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.540.000
5.1.1.05.0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.360.000	5.1.1.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	45.360.000
5.1.01.01.05.0002		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	26.180.000	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	26.180.000
5.1.1.06		Belanja Tunjangan Beras ASN	126.721.760	5.1.1.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	126.721.760
5.1.1.06.0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	94.610.720	5.1.1.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	94.610.720
5.1.01.01.06.0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK	32.111.040	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	32.111.040
5.1.1.07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	51.318.706	5.1.1.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	51.318.706
5.1.1.07.0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	51.318.706	5.1.1.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	51.318.706
5.1.01.01.07.0002		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-
5.1.1.08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	325.574	5.1.1.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	325.574
5.1.1.08.0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS	215.122	5.1.1.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	215.122
5.1.01.01.08.0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	110.452	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	110.452
5.1.1.09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	210.776.138	5.1.1.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	210.776.138
5.1.1.09.0001		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	170.493.226	5.1.1.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	170.493.226
5.1.01.01.09.0002		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	40.282.912	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	40.282.912
5.1.1.10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	45.261.108	5.1.1.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	45.261.108

No	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		52.210.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.210.000	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		52.210.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	52.210.000	-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		92.606.612	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	92.606.612	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		38.570.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.570.000	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		54.036.612	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	54.036.612	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		106.388.665	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	106.388.665	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		80.410.336	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.410.336	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		25.978.329	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	25.978.329	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		7.942.076	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.942.076	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		7.320.626	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.320.626	-
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		621.450	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	621.450	-
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		24.582	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.582	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		18.582	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.582	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		6.000	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.000	-
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		140.432.083	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	140.432.083	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		108.810.203	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	108.810.203	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		31.621.880	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	31.621.880	-
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		3.299.579	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.299.579	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		2.572.379	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.572.379	-
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		727.200	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	727.200	-
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		9.717.162	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.717.162	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		7.717.162	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.717.162	-
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		2.000.000	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.000.000	-
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		29.351.744	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	29.351.744	-
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		22.351.744	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	22.351.744	-
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		7.000.000	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	7.000.000	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		2.045.420.100	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.045.420.100	-
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		818.168.040	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	818.168.040	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		638.503.240	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	638.503.240	-
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		179.664.800	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	179.664.800	-
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		1.227.252.060	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.227.252.060	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		957.754.860	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	957.754.860	-
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		269.497.200	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	269.497.200	-
14	2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.620.437.384	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.620.437.384	-
5.1	Belanja Operasi		3.620.437.384	5.1	Belanja Operasi	3.620.437.384	-
5.1.01	Belanja Pegawai		3.620.437.384	5.1.01	Belanja Pegawai	3.620.437.384	-
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		1.917.567.384	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.917.567.384	-
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		1.273.239.000	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.273.239.000	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		1.183.532.040	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.183.532.040	-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		89.706.960	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	89.086.960	(620.000)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		162.191.279	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	162.191.279	-

No	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		150.529.374	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	150.529.374	-
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		11.661.905	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.661.905	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		91.775.000	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	91.775.000	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		91.775.000	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	91.775.000	-
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		117.600.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	117.600.000	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		117.600.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	117.600.000	-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		34.705.000	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.705.000	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		29.525.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.525.000	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		5.180.000	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.180.000	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		83.648.120	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.648.120	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		74.523.200	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.523.200	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		9.124.920	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.124.920	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		11.480.416	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.480.416	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		11.480.416	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.480.416	-
5.1.01.01.07.0002	Tunjangan PPh PPPK				Tunjangan PPh PPPK	620.000	620.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		348.427	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	348.427	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		342.787	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	342.787	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		5.640	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.640	-
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		114.423.254	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	114.423.254	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		105.300.000	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	105.300.000	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		9.123.254	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.123.254	-
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		5.752.275	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.752.275	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		5.410.908	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.410.908	-
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		341.367	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	341.367	-
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		11.604.613	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.604.613	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		10.832.659	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.832.659	-
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		771.954	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	771.954	-
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		10.800.000	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	10.800.000	-
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		10.800.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	10.800.000	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		1.702.870.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.702.870.000	-
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		644.426.000	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	644.426.000	-
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		610.210.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	610.210.000	-
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		34.216.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	34.216.000	-
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		1.058.444.000	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.058.444.000	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		1.007.120.000	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.007.120.000	-
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		51.324.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	51.324.000	-
15	2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN			DINAS PERHUBUNGAN		
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.607.572.506	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.607.572.506	-
5	BELANJA DAERAH		4.607.572.506	5	BELANJA DAERAH	4.607.572.506	-
5.1	BELANJA OPERASI		4.607.572.506	5.1	BELANJA OPERASI	4.607.572.506	-
5.1.01	Belanja Pegawai		4.607.572.506	5.1.01	Belanja Pegawai	4.607.572.506	-
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		2.521.694.083	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.521.694.083	-

No	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.832.837.048	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.830.837.048	- 2.000.000
	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.371.089.916	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.369.089.916	- 2.000.000
	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	461.747.132	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	461.747.132	-
	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	170.221.576	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	170.221.576	-
	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	151.200.000	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	151.200.000	-
	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.021.576	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.021.576	-
	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	124.468.500	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	124.468.500	-
	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	124.468.500	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	124.468.500	-
	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	51.891.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	51.891.000	-
	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	51.891.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	51.891.000	-
	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	91.118.468	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	91.118.468	-
	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.278.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.278.000	-
	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	50.840.468	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	50.840.468	-
	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	88.036.760	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	88.036.760	-
	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.713.902	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.713.902	-
	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.322.858	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.322.858	-
	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.199.988	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.199.988	-
	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.199.988	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.199.988	-
	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000	2.000.000
	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.503.887	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.503.887	-
	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.498.886	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.498.886	-
	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.001	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.001	-
	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	117.406.812	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	117.406.812	-
	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	110.554.596	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	110.554.596	-
	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.852.216	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.852.216	-
	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.849.286	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.849.286	-
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.458.630	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.458.630	-
	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	390.656	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	390.656	-
	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.440.758	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.440.758	-
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.375.862	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.375.862	-
	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.064.896	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.064.896	-
	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.720.000	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9.720.000	-
	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.560.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.560.000	-
	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.160.000	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	2.160.000	-
	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.085.878.423	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.085.878.423	-
	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	922.798.400	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	922.798.400	-
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	881.470.400	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	881.470.400	-
	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	41.328.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	41.328.000	-

No	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		1.163.080.023	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.163.080.023	-
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		1.103.088.023	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.103.088.023	-
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		59.992.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	59.992.000	-
16	4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH		4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH		
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.647.089.618	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.647.089.618	-
5.1	BELANJA OPERASI		18.647.089.618	5.1	BELANJA OPERASI	18.647.089.618	-
5.1.01	Belanja Pegawai		18.647.089.618	5.1.01	Belanja Pegawai	18.647.089.618	-
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		10.307.069.618	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.307.069.618	-
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		7.148.302.086	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	7.148.302.086	-
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		6.043.772.584	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.043.772.584	-
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		1.104.529.502	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.104.529.502	-
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		628.207.694	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	628.207.694	-
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		539.190.379	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	539.190.379	-
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		89.017.315	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	89.017.315	-
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		443.831.920	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	443.831.920	-
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		443.831.920	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	443.831.920	-
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		489.128.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	489.128.000	-
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		489.128.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	489.128.000	-
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		331.536.829	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	331.536.829	-
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		192.751.937	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	192.751.937	-
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		138.784.892	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	138.784.892	-
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		344.848.943	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	344.848.943	-
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		306.878.626	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	306.878.626	-
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		37.970.317	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	37.970.317	-
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		43.351.001	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	43.351.001	-
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		40.209.771	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	40.209.771	-
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK		3.141.230	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	3.141.230	-
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		252.774	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	252.774	-
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		172.703	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	172.703	-
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		80.071	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	80.071	-
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		638.325.641	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	638.325.641	-
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		516.883.827	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	516.883.827	-
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		121.441.814	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	121.441.814	-
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		17.164.159	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	17.164.159	-
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		14.097.238	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.097.238	-
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		3.066.921	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.066.921	-
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		50.056.877	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	50.056.877	-
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		42.291.925	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	42.291.925	-
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		7.764.952	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	7.764.952	-
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		172.063.694	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	172.063.694	-
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		172.063.694	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	172.063.694	-
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		8.340.020.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.340.020.000	-
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		3.264.287.080	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.264.287.080	-

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.112.984.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.112.984.000
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	151.303.080	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	151.303.080
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.075.732.920	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.075.732.920
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.848.778.300	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.848.778.300
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	226.954.620	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	226.954.620
17	1-02.0-00.0-00.01.001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.800.885.670	1-02.0-00.0-00.01.001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.800.885.670
2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.800.885.670	2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.800.885.670
5.	Belanja Daerah	Belanja Daerah	5.800.885.670	5.	Belanja Daerah	5.800.885.670
5.1	Belanja Operasi	Belanja Operasi	5.800.885.670	5.1	Belanja Operasi	5.800.885.670
5.1.01	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	5.800.885.670	5.1.01	Belanja Pegawai	5.800.885.670
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.898.430	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.898.430
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Belanja Gaji Pokok ASN	2.241.879.733	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.241.879.733
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Belanja Gaji Pokok PNS	1.750.673.936	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.750.673.936
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK	491.205.797	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	491.205.797
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	197.176.504	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	197.176.504
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	181.478.864	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	181.478.864
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.697.640	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.697.640
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	190.110.000	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	190.110.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	190.110.000	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	190.110.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	348.846.149	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	348.846.149
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	333.846.149	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	333.846.149
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.000.000	5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15.000.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.694.408	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	99.694.408
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.720.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.720.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	48.974.408	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	48.974.408
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Belanja Tunjangan Beras ASN	127.647.480	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	127.647.480
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Belanja Tunjangan Beras PNS	100.417.560	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	100.417.560
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Belanja Tunjangan Beras PPPK	27.229.920	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	27.229.920
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.534.554	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.534.554
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.994.554	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.994.554
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	540.000	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	540.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Belanja Pembulatan Gaji ASN	756.000	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	756.000
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Belanja Pembulatan Gaji PNS	540.000	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	540.000
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	216.000	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	216.000
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	181.161.054	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	181.161.054
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	164.454.434	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	164.454.434
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	16.706.620	5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	16.706.620
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.338.058	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.338.058
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.400.000	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.400.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	938.058	5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	938.058
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	15.774.052	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	15.774.052
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.960.000	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	12.960.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	2.814.052	5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	2.814.052
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	14.980.438	5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	14.980.438

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	9.040.438	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	9.040.438
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	5.940.000	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan	5.940.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.358.987.240	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.358.987.240
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.024.985.600	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.024.985.600
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	864.433.600	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	864.433.600
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	160.552.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	160.552.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.334.001.640	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.334.001.640
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.093.173.640	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.093.173.640
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	240.828.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	240.828.000
18	2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		2.11.3.28.0.00.02.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.11.01.2.02	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	10.099.316.647	2.11.01.2.02	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan	10.099.316.647
5	BELANJA DAERAH	BELANJA DAERAH	10.099.316.647	5	BELANJA DAERAH	10.099.316.647
5.1	BELANJA OPERASI	BELANJA OPERASI	10.099.316.647	5.1	BELANJA OPERASI	10.099.316.647
5.1.01	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai	10.099.316.647	5.1.01	Belanja Pegawai	10.099.316.647
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.998.076.647	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.998.076.647
5.1.01.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.835.126.435	5.1.01.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.835.126.435
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Belanja Gaji Pokok PNS	3.411.391.000	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.411.391.000
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Belanja Gaji Pokok PPPK	423.735.435	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	423.735.435
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	508.066.850	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	508.066.850
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	452.000.000	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	452.000.000
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	56.066.850	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	56.066.850
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	226.000.000	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	226.000.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	182.476.000	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	182.476.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	182.476.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	182.476.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	279.225.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	279.225.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	254.250.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	254.250.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.975.000	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	24.975.000
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	428.956.800	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	428.956.800
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Belanja Tunjangan Beras ASN	389.850.000	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	389.850.000
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Belanja Tunjangan Beras PNS	39.106.800	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	39.106.800
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.820.000	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.820.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.820.000	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.820.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	-	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	-
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.191.380	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.191.380
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.180.850	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.180.850
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.530	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.530
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	408.732.720	5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	408.732.720
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	389.850.000	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	389.850.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	18.882.720	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	18.882.720
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	23.561.200	5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	23.561.200
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	22.600.000	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	22.600.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	961.200	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	961.200
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	47.450.262	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	47.450.262
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	44.566.797	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	44.566.797
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.883.465	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	2.883.465
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK				

SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
No	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7
5.1.01.01.12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	41.470.000	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	41.470.000
5.1.01.01.12.0001		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	21.470.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	21.470.000
5.1.01.01.12.0002		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	20.000.000	5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	20.000.000
5.1.01.02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.101.240.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.101.240.000
5.1.01.02.01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.738.612.000	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.738.612.000
5.1.01.02.01.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.596.112.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.596.112.000
5.1.01.02.01.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	142.500.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	142.500.000
5.1.01.02.05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.362.628.000	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.362.628.000
5.1.01.02.05.0001		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.150.228.000	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.150.228.000
5.1.01.02.05.0002		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	212.400.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	212.400.000
19		DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	5.676.152.247	2.07.3.31.3.32.05.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	5.676.152.247
2.02.001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.676.152.247	2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.676.152.247
5.		BELANJA DAERAH	5.676.152.247	5.	BELANJA DAERAH	5.676.152.247
5.1		BELANJA OPERASI	5.676.152.247	5.1	BELANJA OPERASI	5.676.152.247
5.1.01		Belanja Pegawai	3.245.542.247	5.1.01	Belanja Pegawai	3.245.542.247
5.1.01.01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.245.542.247	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.245.542.247
5.1.01.01.01		Belanja Gaji Pokok ASN	2.192.842.247	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.040.942.247
5.1.01.01.01.0001		Belanja Gaji Pokok PNS	1.742.842.247	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.590.942.247
5.1.01.01.01.0002		Belanja Gaji Pokok PPPK	450.000.000	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	450.000.000
5.1.01.01.02		Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.000.000	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	210.000.000
5.1.01.01.02.0001		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	160.000.000	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	160.000.000
5.1.01.01.02.0002		Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.000.000	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.000.000
5.1.01.01.03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	110.000.000	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	123.720.000
5.1.01.01.03.0001		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	110.000.000	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	123.720.000
5.1.01.01.04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	290.000.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	428.180.000
5.1.01.01.04.0001		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	290.000.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	428.180.000
5.1.01.01.05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.000.000	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	105.000.000
5.1.01.01.05.0001		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.000.000	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.000.000
5.1.01.01.05.0002		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPP	80.000.000	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPP	80.000.000
5.1.01.01.06		Belanja Tunjangan Beras ASN	125.000.000	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	125.000.000
5.1.01.01.06.0001		Belanja Tunjangan Beras PNS	90.000.000	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	90.000.000
5.1.01.01.06.0002		Belanja Tunjangan Beras PPPK	35.000.000	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	35.000.000
5.1.01.01.07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.000.000	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.000.000
5.1.01.01.07.0001		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.000.000	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.000.000
5.1.01.01.07.0002		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000	5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000
5.1.01.01.08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	200.000	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	200.000
5.1.01.01.08.0001		Belanja Pembulatan Gaji PNS	150.000	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	150.000
5.1.01.01.08.0002		Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.000	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	50.000

No	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN		160.000.000	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN		
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS		125.000.000	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS		160.000.000
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK		35.000.000	5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK		125.000.000
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		5.500.000	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		35.000.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		4.000.000	5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		5.500.000
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		1.500.000	5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		4.000.000
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN		16.000.000	5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN		1.500.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS		12.000.000	5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS		16.000.000
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK		4.000.000	5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK		12.000.000
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		17.000.000	5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		4.000.000
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		13.000.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		17.000.000
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		4.000.000	5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		13.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		2.430.610.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		4.000.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		979.400.000	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN		2.430.610.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		819.400.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		979.400.000
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		160.000.000	5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		819.400.000
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		1.451.210.000	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		160.000.000
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		1.211.210.000	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		1.451.210.000
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		240.000.000	5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK		1.211.210.000
20	7.01.01	KECAMATAN BONANG					
01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.975.629.769	7.01.01.2.02.12.5	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.975.629.769
5.1	BELANJA OPERASI		1.975.629.769	5.1	BELANJA OPERASI		1.975.629.769
5.1.01	Belanja Pegawai		1.975.629.769	5.1.01	Belanja Pegawai		1.975.629.769
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		1.293.799.769	5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		1.293.799.769
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		966.530.464	5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		962.530.464
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		966.530.464	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		4.000.000
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		93.728.855	5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		4.000.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		93.728.855	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		93.728.855
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		63.104.700	5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		63.104.700
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		63.104.700	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		63.104.700
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		905.000	5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		905.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		905.000	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		905.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		34.347.100	5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		34.347.100
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		34.347.100	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		34.347.100
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		50.748.586	5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		50.748.586
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		50.748.586	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		50.748.586
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		4.227.396	5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		4.000.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		4.227.396	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		4.000.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		18.712	5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		18.712
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		18.712	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		18.712
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN		64.009.068	5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN		64.009.068
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS		64.009.068	5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS		64.009.068
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		2.169.948	5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		2.169.948

No	SEBELUM PERGESERAN			SETELAH PERGESERAN			TAMBAH/ KURANG
	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.169.948	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.169.948	-
	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.509.940	5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.509.940	-
	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.509.940	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.509.940	-
	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.500.000	5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	7.500.000	-
	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.500.000	5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	7.500.000	-
	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	681.830.000	5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	681.830.000	-
	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	274.732.000	5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	274.732.000	-
	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	274.732.000	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	274.732.000	-
	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	407.098.000	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	407.098.000	-
	5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	407.098.000	5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	407.098.000	-

BUPATI DEMAK

EISTI'ANAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Bab VI huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor;
- c. bahwa guna pemenuhan pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, agar dapat melakukan penyesuaian anggaran dengan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah untuk ketiga kalinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, dengan Pergeseran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah dengan daftar pergeseran/ perubahan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : bpkpad@demakkab.go.id

**MATRIKS KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
DEMAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI DEMAK NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024**

PASAL	DASAR
Pasal 1	Local Wisdom
Pasal 2	Local Wisdom

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si. /
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670821 198607 1 001



**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112).

Bahwa dengan adanya perubahan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, saat ini perlu disesuaikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kontribusi, mulai Tim Penyusun dan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang memberikan masukan berharga.

Implementasi pelaksanaan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 agar dapat dilaksanakan secara cermat, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan rancangan peraturan ini. Semoga peraturan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan pelayanan Pemerintah Kabupaten Demak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN	7
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
BAB IV PENUTUP	10
A. Simpulan	10
B. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada asas otonomi yang seluas-luasnya memberikan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kepentingan masyarakatnya guna percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat dalam bingkai negara kesatuan yang berbentuk republik.

Sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat sentral sehingga dalam formulasinya dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai legalisasi kebijakannya. Berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Namun demikian dengan adanya Persetujuan PPKD Nomor 900/0995, tanggal 26 Maret 2024, Hal: tentang persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun Anggaran 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran dalam kegiatan dimaksud.

Dalam rangka menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dapat dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Sehingga dengan demikian untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 menjadi urgen terhadap dilakukannya Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Identifikasi Masalah

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112), Diperlukannya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak tahun 2024.

C. Tujuan Penyusunan

1. Sebagai upaya penyelarasan produk hukum atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.
2. Sebagai *legal standing* dalam penganggaran dan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak yang transparan, akurat, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163)
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112)
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, mempertimbangkan beberapa pokok pikiran sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi

Peraturan Bupati ini menjadi dasar untuk melaksanakan adanya perubahan pendapatan dan belanja pada tahun anggaran 2024.

2. Fungsi Perencanaan

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi pengguna anggaran untuk merencanakan Kegiatan pada tahun anggaran 2024

3. Fungsi Pengawasan

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi Alokasi

Peraturan Bupati ini memuat anggaran daerah yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Tertib

Semua Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan dapat dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Efisien, efektif dan ekonomis

Program/Kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan efisien, efektif dan ekonomis.

7. Transparan

Perubahan Peraturan Bupati ini memungkinkan dipublikasikan kepada masyarakat

8. Akuntabilitas

Pelaksanaan Peraturan Bupati dapat tepat regulasi, tepat sasaran, tepat penganggaran, tepat waktu, tepat penggunaan dan tepat pertanggungjawaban.

9. Manfaat untuk Masyarakat

Hal-hal yang diatur dalam perubahan peraturan Bupati ini mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 memiliki sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang melibatkan berbagai pihak. Berikut adalah beberapa pertimbangan mengenai sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024:

1. Sasaran
 - a. Perangkat Daerah di Kabupaten Demak

2. Jangkauan
 - a. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD mencakup seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Demak yang memerlukan penyesuaian belanja dalam penganggarannya.
 - b. Jangka waktu pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati adalah 1 Tahun anggaran.

3. Arah Pengaturan
 - a. Arah pengaturan menekankan pada pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah agar dapat segera dilaksanakan.
 - b. Menentukan jangka waktu pelaksanaan APBD TA 2024.

Dengan mempertimbangkan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan ini, pemerintah dapat mengimplementasikan pelaksanaan perubahan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaan APBD.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, meliputi :

1. Pergeseran anggaran dilakukan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD.

2. Dalam Pergeseran anggaran ini terdiri atas 20 OPD, meliputi :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Dinas Pertanian
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
 5. Kecamatan Mijen
 6. Satuan Polisi Pamong Praja
 7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
 8. Badan pengelolaan Keuangan, Pendapatan Aset Daerah
 9. Dinas pariwisata
 10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 11. Dinas Kelautan dan Perikanan
 12. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
 13. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 14. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 15. Dinas Perhubungan
 16. Sekretariat Daerah
 17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 18. Dinas Lingkungan Hidup
 19. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 20. Kecamatan Bonang

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Kabupaten Demak perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai dasar penyusunan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2024.

B. Saran

Perlu adanya prioritas dan percepatan dalam penetapan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 karena akan menjadi instrument hukum yang mendasar dalam pembiayaan kegiatan yang berdampak dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Mengetahui,

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Drs. AGUS MUSYAFK, MSi.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 13);
4. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**
Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Telepon (0291) 685660

NOTA DINAS

KEPADA : YTH. PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DEMAK
DARI : PIt. KEPALA BPKPAD KABUPATEN DEMAK
TANGGAL : 28 MARET 2024
PERIHAL : MOHON KAJIAN HUKUM KONSEP PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR
40 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN 2024

Dengan Hormat, bersama ini kami sediakan konsep Peraturan Bupati Demak tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 untuk dilakukan kajian oleh Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kajian hukum yang diberikan kami sampaikan terimakasih.



KEPALA BPKPAD
KABUPATEN DEMAK

Drs. AGUS MUSYAFAK, MSi /

Pembina Utama Muda

NIP. 19670821 198607 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Kyai Jebat Nomor 881 A Demak Kode Pos 59511

Telp. (0291) 685660 Faksimile (0291) 685660

Laman : <https://bpkpad.demakkab.go.id> Pos-el : bpkpad@demakkab.go.id

Nomor : 900/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Perubahan Usulan Propemperkada
Tahun 2024

Demak, 28 Maret 2024

Kepada
Yth Kepala Bagian Hukum
SETDA Kabupaten Demak
di

Demak

Menindaklanjuti surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Nomor 900/0995/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Yang Sama Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami kirimkan daftar usulan Propemperkada Tahun 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah bersama draft Rancangan peraturan bupati yang dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DEMAK



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670821 198607 1 001